

**DIPLOMASI KOERSIF AMERIKA SERIKAT TERHADAP IRAN PASCA
MUNDUR DARI *JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION* (JCPOA)
TAHUN 2018**

Rud Calara Cintia Simanjuntak

Email: rud.calara4454@student.unri.ac.id

Dibawah Pembimbing: Dr. H. Mhd. Saeri, M.Hum

Email: m.saeri@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru
Pekanbaru 28294
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research analyzes how the United States' foreign policy in the Trump regime, regarding its coercive diplomacy towards Iran through the application of sanctions after the withdrawal from the JCPOA multilateral agreement. The American decision was taken when Iran was still complying with the terms of the JCPOA agreement. Through this paper, the author explains that the reason for the United States' withdrawal from the JCPOA agreement was basically due to the non-realization of America's interests towards Iran in the agreement, so to achieve this interest, the United States pressured Iran in the form of coercive diplomacy.

This research was completed through qualitative methods and descriptive analysis, with data collection techniques through literature study sourced from several books, journals, articles, and websites. This study uses the realism perspective and the theory of coercive diplomacy developed by Tom Suer, which the author develops into five main variables, namely goals, demands, threats, time pressure, and motivation.

The results indicate that the coercive diplomatic policy implemented by the United States has so far not been effective in achieving its goals, even though American sanctions have succeeded in suppressing the Iranian economy. The ineffectiveness of the sanctions can be seen from Iran's response, which is still continuing to enrich uranium.

Keywords: JCPOA, Coercive Diplomacy, United States - Iran.

Pendahuluan

Iran adalah salah satu negara yang termasuk dalam deretan negara yang mengembangkan nuklir dengan tujuan pengembangan energi. Namun, Iran dianggap telah berupaya untuk mengembangkan program nuklirnya untuk tujuan militer, maka aktivitas program nuklir Iran menjadi isu yang sangat kontroversi.

Pada awalnya, program nuklir yang dilakukan oleh Iran ini didukung penuh oleh Amerika Serikat dalam rancangan programnya yaitu "*Atom for Peace*", sehingga hal ini menyebabkan hubungan antara Amerika Serikat dan Iran menjadi sangat dekat. Amerika Serikat memberikan dukungan penuh terhadap program nuklir yang dilaksanakan oleh Iran. Namun, hal tersebut berubah pada tahun 1979 seiring dengan terjadinya revolusi Iran, dimana Presiden Shah Pahlevi digulingkan dan digantikan oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini.¹

Pada tahun 1980, Iran mulai memaksimalkan bahan bakar nuklir asli dengan mengembangkan infrastruktur penambangan uranium. Hingga pada akhirnya, program nuklir Iran semakin maju dan berkembang. Semakin jauh dalam pengembangan tenaga nuklirnya, Iran sering kali melebihi batas. Hal ini menimbulkan kecurigaan oleh Amerika Serikat yang beranggapan bahwa sesungguhnya Iran melakukan

pengembangan senjata pemusnah massal. Tetapi sebaliknya, Iran menentang hal tersebut dan menyatakan bahwa program nuklir yang dijalankan hanyalah untuk pengetahuan dan energi.

Pada tahun 2006, UE+3 bergabung dan bernegosiasi dengan Amerika Serikat, Tiongkok dan Rusia bergabung untuk membentuk P5 + 1, untuk menuntut Iran menghentikan pengayaan nuklir dan uraniuimnya. Negosiasi tersebut menuntut agar Iran menghentikan kegiatan pengayaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Iran, termasuk larangan transfer teknologi nuklir dan rudal ke negara itu dan membekukan aset individu dan entitas Iran tertentu untuk menekan negara.²

Setelah beberapa putaran negosiasi, pada 24 November 2013, terbentuklah sebuah perjanjian sementara mengenai program nuklir Iran yaitu Joint Plan of Action, yang ditandatangani antara Iran dan negara-negara P5 +1 di Jenewa, Swiss. Perjanjian tersebut terdiri dari pembekuan jangka pendek bagian-bagian dari program nuklir Iran dengan imbalan pengurangan sanksi ekonomi terhadap Iran, ketika negara-negara itu bekerja menuju kesepakatan jangka panjang. IAEA juga memulai inspeksi yang lebih intrusif dan sering di bawah perjanjian sementara ini.

Kesepakatan yang dicapai akan memberi jaminan terbesar bahwa Iran tidak akan diam - diam mengembangkan senjata nuklir

¹ *Nuclear Threat Initiative*, 18 April 2014, "Iran Set to Receive Funds Under Atomic - Pact Terms", melalui <https://www.nti.org/gsn/article/iran-set-receive-funds-under-atomic-pact/> (diakses pada 5 Juli 2021 pukul 13.42)

² *Nuclear Threat Initiative*, 3 Maret 2014, "Iran Reduces Key Uranium Stocks by Half: U.N. Agency", melalui <https://www.nti.org/gsn/article/iran-cuts-uranium-half-un-agency/> (diakses pada 5 Juli 2021 pukul 10.07)

tanpa pengawasan. Perjanjian ini dinilai akan menyediakan sarana yang kuat, lebih komprehensif, dan akan lebih aman untuk membatasi program nuklir Iran dibandingkan alternatif yang lebih realistis. Sehingga kerangka kesepakatan JCPOA ini menjadi pilihan terbaik yang tersedia untuk memblokir Iran dari kepemilikan bom nuklir.

Kebijakan Iran untuk menyepakati kesepakatan nuklir damai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada tahun 2015 tentu memiliki beberapa pertimbangan. Keputusan pemerintah Iran untuk menyepakati JCPOA ialah dilandaskan pada kondisi internal juga eksternal. Kepentingan yang dimiliki oleh Iran dalam JCPOA ialah pada bidang perekonomian, bidang pertahanan, dan bidang ideologi. Pada bidang perekonomian, keringanan sanksi yang diberikan oleh negara yang terlibat dalam JCPOA berdampak pada peningkatan perekonomian Iran. Pada bidang pertahanan, tidak adanya peraturan mengenai rudal balistik dalam JCPOA dimanfaatkan Iran untuk mengembangkannya lebih besar. Pada bidang ideologi, nilai-nilai anti-amerika yang sudah ada sejak revolusi 1979 semakin diperkuat dengan adanya JCPOA³.

Namun seiring berjalannya JCPOA, selama masa kampanye menuju pergantian kepemimpinan Amerika Serikat, Donald Trump mengkritik tegas terkait perjanjian ini. Trump mengatakan bahwa akan terus berusaha untuk menegosiasikan kembali perjanjian

dengan tujuan menegakkan ketentuan secara ketat atau keluar dari perjanjian tersebut. Pada akhirnya, pergantian kepemimpinan AS membawa perubahan pula terhadap perjanjian tersebut. Timbulnya berbagai tuntutan dan tuduhan terhadap Iran dan JCPOA oleh Amerika Serikat, bahwa Iran tidak melaksanakan mandat yang diberikan JCPOA. Hal ini menunjukkan adanya arah kebijakan luar negeri yang sangat kontras dari pemerintahan Amerika Serikat sebelumnya. Pada akhirnya, Amerika Serikat memutuskan untuk mundur dari perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada tanggal 8 Mei 2018. Amerika Serikat berpendapat bahwa JCPOA gagal mencapai tujuan yaitu menjadikan Iran sebagai negara non-nuklir, melainkan JCPOA hanya menunda mereka menjadi negara nuklir.⁴

Keputusan Amerika untuk mundur dari JCPOA tentunya sudah melalui pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan mengikutsertakan prinsip dan faktor-faktor yang ada, baik internal maupun eksternal. Keputusan Amerika tersebut didasari oleh beberapa alasan, diantaranya pertama, Iran telah melanggar perjanjian atau ketentuan dari JCPOA pada tahun 2016 yang berkaitan dengan hal batas pasokan heavy water, Amerika menyebut bahwa Iran telah melanggarnya sebanyak dua kali. Kedua, tidak tercapainya usulan

³ Arif Ramahdan, 2 Juli 2019, "Kepentingan Nasional Iran Dalam *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) Tahun 2015-2017", 2019, FISIP Unila

⁴ *LobeLog*, 16 November 2016, "Can the Iran

Deal Survive a US Withdrawal?", melalui <https://lobelog.com/can-the-iran-deal-survive-a-us-withdrawal/> (diakses pada 9 Agustus 2020 Pukul 20.03 WIB)

revisi JCPOA dan tuntutan Amerika terhadap Iran. Sebelumnya, Trump telah menuntut amandemen baru terhadap perjanjian JCPOA dan menegaskan dua kemungkinan yang akan dilakukan kedepannya yaitu memperbaiki kesepakatan JCPOA atau Amerika akan mundur. Selain itu, Amerika menganggap Iran masih menjadi negara yang mensponsori terorisme dan melakukan kekerasan di kawasan Timur Tengah. Dengan mundurnya AS dengan alasan ini maka AS berharap Iran dapat mengubah perilaku dan rezimnya, karena adanya tekanan dari AS.⁵

Tidak berhenti di situ, setelah mengumumkan pengunduran diri Amerika Serikat dari JCPOA, Trump juga mengancam untuk menjatuhkan *'the toughest ever sanctions'* kepada Iran jika tidak memenuhi tuntutan Amerika Serikat dalam periode waktu yang ditentukan. Ancaman itu akan dilakukan dengan cara mengimplementasikan kembali semua sanksi yang telah dihapus melalui kesepakatan JCPOA serta menerapkan berbagai sanksi baru yang dapat menekan Iran secara maksimal.

Tujuan utama dari diberlakukannya sanksi penuh tersebut adalah agar Iran terdesak untuk mau berunding kembali dengan AS terkait program nuklirnya dan dengan harapan terciptanya sebuah kesepakatan baru

yang 'lebih komprehensif' yang pada gilirannya dapat secara permanen mencegah Iran untuk memperoleh senjata nuklir. Di lain sisi, AS juga berharap bahwa negara-negara penandatangan JCPOA lainnya dapat segera mengikuti langkah AS sehingga posisi Iran semakin terdesak.⁶

Bersadarkan permasalahan tersebut, Amerika Serikat dinilai tidak konsisten dalam mengeluarkan kebijakan luar negeri terhadap Iran dengan melakukan diplomasi koersif, yang merupakan upaya pemaksaan (*coercion*) melalui ancaman dalam bentuk penggunaan kekerasan atau sanksi, dengan tujuan untuk mengubah perilaku negara target.

Praktik diplomasi koersif Amerika Serikat terhadap Iran ini dianggap sebagai inkonsistensi kebijakan Amerika Serikat, dimana Amerika Serikat tidak menerapkan kebijakan yang sama terhadap negara-negara lain yang terindikasi melakukan pengembangan nuklir seperti Iran, misalnya Korea Utara dan Pakistan. Lebih dari itu, India dan Israel bahkan mendapatkan asistensi dari Amerika Serikat dalam mengembangkan senjata nuklirnya. Oleh karena permasalahan tersebut, penulis tertarik meneliti kepentingan Amerika Serikat dalam melaksanakan diplomasi koersif terhadap Iran pasca mundur dari perjanjian JCPOA.⁷

⁵ *The White House*, 8 Mei 2018, "Ceasing U.S. Participation in the JCPOA and Taking Additional Action to Counter Iran's Malign Influence and Deny Iran All Paths to a Nuclear Weapon", melalui <https://trumpwhitehouse.archives.gov/press-identical-actions/ceasing-u-s-participation-jcpoa-taking-additional-action-counter->

[irans-malign-influence-deny-iran-paths-nuclear-weapon/](https://trumpwhitehouse.archives.gov/press-identical-actions/ceasing-u-s-participation-jcpoa-taking-additional-action-counter-irans-malign-influence-deny-iran-paths-nuclear-weapon/) (diakses pada 10 Juni 2021 Pukul 21.01 WIB)

⁶ Muhammad Fachri Abdillah, Skripsi : "Kebijakan Amerika Serikat Terhadap Iran Pasca Mundurnya AS dari JCPOA", (Bandung, FISIP UKI, 2015) hal 7

⁷ RFE/RL, 3 November 2018, "Trump

Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

Perspektif Realisme

Perspektif yang dipakai dalam penelitian ini adalah perspektif Realisme. Realis berpandangan bahwa kerja sama dan institusi bukan merupakan faktor terpenting, melainkan hanya salah satu alat bagi negara untuk mewujudkan kepentingannya. Demikian Amerika dalam kasus ini menganggap perjanjian JCPOA hanyalah sebuah kesepakatan yang hanya menguntungkan Iran, dan tidak dapat mencapai tujuan baiknya. Sehingga demi mencapai kepentingan nasionalnya, Amerika memutuskan untuk keluar dari kesepakatan JCPOA, dan mengambil kebijakan-kebijakan terhadap Iran dalam bentuk diplomasi yang bersifat koersif.

Konsep Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Dalam perkembangan negara-negara yang semakin pesat, maka setiap negara membutuhkan kerjasama untuk memenuhi kepentingan-kepentingan dalam negerinya. Tujuan mendasar serta faktor paling menentukan para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri menurut Jack Plano dan Roy Olton

adalah *national interest* (kepentingan nasional).⁸

Teori Diplomasi Koersif

Terminologi diplomasi koersif pertama kali dijelaskan pada buku karangan Alexander George, David K. Hall dan William R. Simons yang berjudul : *The Limits Of Coercive Diplomacy : Laos-Cuba-Vietnam*". Hingga kemudian diikuti dengan keberhasilan Amerika menerapkan diplomasi koersif ini pada krisis Kuba tahun 1962 memberikan pengaruh besar terhadap prospek keberhasilan diplomasi ini.⁹

Diplomasi koersif dapat digunakan secara agresif untuk membujuk korban agar menyerahkan sesuatu yang berharga tanpa melakukan perlawanan. Strategi ini digunakan sebagai ancaman mencegah musuh, yang dapat membahayakan negara bahkan pada masa yang akan datang. Dalam penerapan diplomasi ini, target diberi kesempatan untuk berhenti atau mundur sebelum diberikan serangan yang lebih membahayakan.¹⁰

Tingkat Analisa

Dalam penelitian ini penulis mengambil tingkat analisa kelompok Negara Bangsa yang menganggap bahwa hubungan internasional adalah interaksi yang dibentuk oleh kelompok negara. Tingkat Analisa ini berasumsi bahwa hubungan internasional pada

Highlights Renewed Iran Sanctions Ahead Of U.S. Elections", melalui <https://www.rferl.org/a/trump-touts-renewed-iran-sanctions-as-selling-point-to-us-voters-congressional-elections-get-out-republican-vote/29580304.html> (diakses pada 10 Juni 2020 Pukul 21.37 WIB)

⁸ Jack C.Plano & Roy Olton, 1990, *Kamus Hubungan Internasional*. CV.Abardin.

Bandung.

⁹ Peter V. Jakobsen, 2013 "*Coercive Diplomacy*", 3rd edition, Oxford : Oxford University Press, hal 241

¹⁰ Alexander L George, 1977, "*Forceful Persuasion: Coercive Diplomacy as an Alternative to War*", Washinngton D.C : United States Institute Of Peace Press, hal 5

dasarnya didominasi oleh perilaku negara. Tingkat analisa negara bangsa menjelaskan bahwa segala tindakan yang terjadi di dunia disebabkan oleh sebuah keputusan dan tindakan yang mengatasnamakan negara. Negara merupakan satu-satunya subjek internasional. Situasi yang dihadapi negara lain menjadi salah satu dasar tindakan bagi sebuah negara untuk dapat bertahan hidup ataupun dalam upaya meningkatkan interaksi dengan negara lain, demi mencapai kepentingan nasionalnya.

Analisa ini juga difokuskan pada proses pembuatan keputusan tentang hubungan internasional, melalui kebijakan luar negeri sebuah negara. Oleh karena itu, analisa ini menekankan pada perilaku negara bangsa karena hubungan internasional pada dasarnya didominasi oleh perilaku kedua objek ini.¹¹

Hasil dan Pembahasan

Kepentingan Amerika Serikat Terhadap Iran

Setelah penandatanganan yang dilakukan negara P5+1 dengan Iran pada tahun 2015, Amerika yang secara sepihak menarik diri dari kesepakatan tersebut memiliki tiga kepentingan utama, yaitu ketakutan tentang Iran yang membuat senjata nuklir secara diam-diam, juga memprediksi Iran akan mengendalikan harga minyak dunia karena kekayaan sumber daya alamnya, selain itu menurut Amerika Serikat, Iran sudah membantu dan mendukung

kelompok teroris yang menjadi kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk menumpas teroris. Disamping itu, pengaruh nuklir Iran hanya merupakan alasan Amerika Serikat untuk dapat menekan Iran.

Lebih jauh dari itu, sesungguhnya Amerika ingin Iran tunduk sepenuhnya terhadapnya. Dikarenakan hal tersebut, Amerika melakukan berbagai sanksi dan ancaman kepada Iran, akan tetapi hal tersebut tidak sedikitpun berefek pada Iran bahkan Iran dengan sengaja memperkuat nuklir dan memperkaya uraniumnya tanpa sedikitpun mengindahkan ancaman dan sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. Selain itu, Amerika Serikat juga melindungi sekutunya Israel yang sudah menjadi musuh Iran terkait konflik Palestina, karena itu Iran menjadi musuh bersama kedua negara tersebut.¹²

Perilaku Amerika Serikat terhadap Iran dianggap hanyalah dalih bagi Amerika Serikat untuk dapat memberikan tekanan penuh terhadap Iran dengan tujuan yang hendak dicapai yakni untuk menciptakan instabilitas ekonomi dan politik domestik sehingga pemerintahan Republik Islam Iran yang telah memerintah selama empat dekade dapat dijatuhkan dan digantikan dengan rezim baru yang lebih pro Amerika. Dengan kata lain, tujuan utama dari strategi diplomasi koersif Amerika Serikat terhadap Iran adalah regime change.

¹¹ Singer. J.D, 2016, "World Politics: The Level of Analysis Problem in International Relations. Theoretical Essay" Volume 14, No. 1, hal. 82 – 87

¹² Kiki Mikail, 2018, "Perjanjian Nuklir Iran dan Kepentingan AS-Israel di Timur Tengah", *Jurnal ICMES* Vol 2, No 1

Diplomasi Koersif Amerika Serikat Terhadap Iran

Keluarnya Amerika Serikat dari perjanjian JCPOA menjadikan Amerika dan sekutu memiliki hak untuk menerapkan sanksi-sanksi terhadap Iran terkhusus dalam bidang ekonomi dan dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan Timur Tengah. Sebelumnya diketahui bahwa Iran sudah memiliki niat yang baik untuk berpartisipasi dan menandatangani kesepakatan JCPOA untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan keamanan kawasan dan Iran sudah tidak lagi mengadopsi politik anti barat seperti pada pemerintahan Presiden Ahmadinejad, yang menjadikan Iran mulai melakukan investasi ke negara barat dan melakukan diplomasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada.

Kesepakatan JCPOA dianggap Amerika sebagai peluang bagi Iran untuk terus meningkatkan politik, ekonomi dan juga persenjataan nuklir mereka. Setelah keputusan Amerika Serikat keluar dari perjanjian JCPOA, maka tidak ada halangan kembali bagi Amerika dan sekutunya untuk kembali mengaktifkan sanksi-sanksi untuk Iran. Amerika Serikat mengajak para sekutu untuk sama-sama melawan Iran. Strategi yang akan diterapkan Amerika Serikat dan sekutu adalah seperti bersama-sama melawan destabilisasi rezim dan dukungan Iran terhadap terorisme yang ada di Timur Tengah. Tidak hanya itu, Amerika Serikat dan

sekutu akan menerapkan sanksi tambahan guna menghalangi pendaan terhadap kelompok-kelompok teroris. Amerika Serikat dan sekutu juga akan membahas tentang rezim proliferasi Iran, seperti rudal balistik dan senjata yang mampu mengancam negara tetangganya dan stabilitas politik di Timur Tengah.

Pasca mundur dari perjanjian JCPOA, Amerika Serikat meluncurkan strategi-strateginya terhadap Iran dalam bentuk diplomasi koersif. Amerika beranggapan bahwa tekanan penuh terhadap Iran merupakan sebuah diplomasi yang bersifat mengikat ataupun memaksa, yang dapat membuat Iran mempertimbangkan proses pengayaan nuklirnya, dan setuju untuk menegosiasikan kembali terkait kesepakatan nuklir dengan Amerika Serikat.¹³

Amerika Serikat sejak masa kepemimpinan presiden Trump mulai menyadari potensi Iran yang memungkinkan untuk merusak tatanan Internasional dikarenakan Iran terus melakukan aksi destruktifnya di kawasan Timur Tengah hingga pelosok Eropa. Sehingga untuk mempertahankan eksistensinya di Timur Tengah, Amerika Serikat memainkan peran dalam permasalahan tersebut dengan *maximum pressure campaign*. Kebijakan ini sudah mulai direncanakan bahkan sebelum presiden Trump terpilih.¹⁴

Kampanye *Maximum pressure* ini akan mendorong kepentingan dari Amerika untuk terwujud tanpa

¹³ White House, 2017, "Remarks by President Trump on Iran Strategy", diakses pada 28 Februari 2021, melalui [www.whitehouse.gov:https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-](https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-)

[president-trump-iran-strategy/](#)

¹⁴ Wolf, R. 2017. "Donal Trump's Status Driven Foreign Policy". *Journal Global Politics and Strategy*. Vol 59 No 5.

kompromi, hingga menjadikan kepatuhan Iran menjadi solusi terakhir bagi negaranya dalam menghadapi sanksi yang agresif ini. Kebijakan *Maximum Pressure* ini akan membuat negara tersebut memahami pelanggaran mereka terhadap perdamaian internasional dan waktu yang mereka habiskan secara sia-sia dalam mengupayakan program senjata nuklir yang melanggar aturan Internasional. Kampanye *Maximum Pressure* yang dilakukan Amerika Serikat sangat berdampak pada segala sector ekonomi maupun politik karena kampanye *Maximum Pressure* menyumbat segala pintu sektor penghasilan mereka dan membuat negara yang dieksekusi terkunci dari dalam tanpa bantuan apapun untuk keluar dari kesulitan yang didapat dari strategi tersebut. Hal inilah yang menjadi suatu hal keterpaksaan bagi negara tersebut untuk menimbang-nimbang segala keputusan yang mereka buat nanti. Washington akan melakukan pendekatan penuh pertimbangan dalam menghadapi rezim jahat tersebut.¹⁵

Kampanye ini dilaksanakan dengan memberikan sanksi sebanyak 17 kali terkait Nuklir Iran yang menargetkan 147 individu dan entitas-entitas yang terkait dengan Iran. *Maximum Pressure* memaksa rezim Teheran memilih opsi yang

ditawarkan untuk menghentikan atau terus merasakan dampak dari kebijakan sanksi agresif yang diberikan kebijakan ini. Pilihan Iran untuk melanjutkan kegiatan destruktifnya telah mengakibatkan konsekuensi yang mematikan dibidang perekonomian negara tersebut ditambah dengan pengupayaan kepentingan untuk kepentingan kelompok yang berada di negara tersebut yang mana memperparah keadaan negara tersebut.¹⁶

Menteri luar negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo mengatakan Amerika Serikat akan menggalang dunia untuk memaksakan tekanan ekonomi yang dapat melumpuhkan Iran untuk membujuknya agar tunduk pada serangkaian tuntutan yang luas, atau menghadapi perubahan rezim. Dalam pidato kebijakan luar negeri pertamanya sejak dia menjadi menteri luar negeri, Mike Pompeo mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan membantu sekutu Eropa, Rusia, dan China dalam upaya mereka saat ini untuk mempertahankan Iran dalam kesepakatan nuklir 2015 setelah Trump menarik diri dari JCPOA. Pemerintahan Trump juga tidak akan cenderung untuk menawarkan keringanan atau pengecualian sanksi sekunder Amerika yang sedang bertahap.¹⁷

¹⁵ Atlantic Council, 2020, "The 'maximum pressure' campaign undermines Trump's national security strategy", diakses pada 25 Juni 2021, melalui <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iran-source/the-maximum-pressure-campaign-undermines-trumps-national-security-strategy/>

¹⁶ Reuters. 3 Mei 2018. "Dollar dips from 2018 high; seen as temporary pause".

Diakses pada 2 Maret 2021. Melalui <https://www.reuters.com/article/idUSL1N1SF1X8>

¹⁷ Arab news, 2019, "US to continue maximum pressure of sanctions on Iran, says Pompeo", diakses pada 25 Juni 2021, melalui <https://www.arabnews.com/node/1597441/middle-east>

Setelah mengumumkan pengunduran diri Amerika Serikat dari JCPOA, Trump juga mengancam untuk menjatuhkan *'the toughest ever sanctions'* kepada Iran jika tidak memenuhi tuntutan Amerika dalam periode waktu yang ditentukan. Ancaman itu akan dilakukan dengan cara mengimplementasikan kembali semua sanksi yang telah dihapus melalui kesepakatan JCPOA serta menerapkan berbagai sanksi baru yang dapat menekan Iran secara maksimal. Sanksi tersebut akan diberlakukan secara bertahap ke dalam dua tenggat waktu, yaitu 90 hari dan 180 hari.

Kenyataannya Iran tidak mengindahkan permintaan ataupun tenggat waktu tersebut. Dengan begitu, sebagaimana yang telah ditetapkan, sebagian sanksi Amerika Serikat mulai berlaku secara efektif pada tenggat waktu pertama tanggal 7 Agustus 2018 dan sebagian lainnya berlaku secara penuh pada tanggal 5 November 2018. Pada tenggat waktu pertama, Amerika mulai memberlakukan sanksi terhadap pembelian dolar Amerika, juga perdagangan emas, logam mulia, aluminium, baja, batu bara dan perangkat lunak serta transaksi yang berkaitan dengan utang luar negeri dan sektor otomotif. Selain itu, dua lisensi yang memungkinkan Iran untuk mengekspor bahan makanan tertentu ke Amerika dan membeli pesawat komersial juga dicabut.

¹⁸ Reuters. 22 Januari 2021. "Iran's oil exports rise 'significantly' despite sanctions, minister say". Diakses pada 5 Maret 2021. Melalui <https://www.reuters.com/article/iran-oil-int-idUSKBN29ROWJ>

Pada tenggat waktu kedua, Amerika Serikat melalui Departemen Keuangannya juga mulai mengimplementasikan sanksi penuhnya terhadap Iran, khususnya terhadap sektor-sektor ekonomi krusial Iran, seperti sektor ekspor minyak yang notabene merupakan tonggak perekonomian Iran, sektor perbankan dan sektor transportasi.¹⁸ Selain itu, sanksi tersebut juga mencakup sanksi terhadap 50 bank Iran beserta anak perusahaannya, black list terhadap lebih dari 200 orang dan kapal di sektor pengirimannya, juga sanksi terhadap maskapai penerbangan nasional Iran (Iran Air) beserta lebih dari 65 unit pesawatnya. Tidak hanya itu, sanksi juga berlaku bagi pihak-pihak yang melakukan hubungan dagang dengan Iran, terkecuali pihak-pihak yang mendapatkan pengecualian dari Amerika Serikat melalui mekanisme oil sanctions waivers sampai pada batas waktu yang telah ditentukan oleh Amerika Serikat.¹⁹

Kebijakan Amerika Serikat ini memiliki dampak atau konsekuensi yang signifikan terhadap kondisi ekonomi Iran. Meskipun sanksi Amerika sendiri berhasil menekan ekonomi Iran, namun kebijakan tersebut menurut peneliti tidak efektif dalam mengubah perilaku Iran yang mana hal tersebut merupakan tujuan dari diberlakukannya sanksi-sanksi tersebut. Ketidakefektifan sanksi tersebut terlihat dari respon Iran yang kembali melakukan pengayaan

¹⁹ Reuters. 14 Januari 2020. "Factbox: Iran's metals under new U.S. sanctions". Diakses pada 12 Maret 2021. Melalui <https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-metals-factbox-idUSKBN1ZD223>

uranium melebihi batas yang ditentukan JCPOA, yang telah mencapai 5 persen dan diprediksi akan mencapai 20 persen pada akhir tahun 2019. Kebijakan luar negeri Amerika hanya mengubah perilaku Iran yang semakin tidak terkontrol.²⁰

Kesimpulan

Amerika Serikat cenderung hanya fokus pada komitmennya untuk melakukan maximum pressure terhadap Iran dan mengesampingkan faktor lainnya yang justru lebih esensial dalam menentukan efektivitas diplomasi koersifnya. Untuk itu, jika Amerika Serikat ingin memastikan efektivitas diplomasi koersifnya, diperlukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pendekatan yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintahan Trump. Peneliti memandang kebijakan dengan cara memberikan beberapa keringanan atau timbal balik yang lebih adil di mata Iran, seperti yang telah dilakukan di dalam kesepakatan JCPOA, akan lebih efektif. Namun kecil kemungkinan pendekatan tersebut akan diadopsi oleh pemerintahan Trump. Sebagai bahan refleksi penulis, diplomasi koersif seharusnya diadopsi oleh suatu negara untuk menjadi alternatif dari kemungkinan diadopsinya opsi perang. Di dalam kasus ini, penulis melihat bahwa strategi diplomasi koersif yang diterapkan oleh Amerika Serikat sejatinya tidak ditujukan untuk membuka peluang negosiasi dengan pemerintahan Iran saat ini,

melainkan untuk menghendaki perubahan secara struktural di pemerintahan Iran itu sendiri melalui regime change. Jika diteruskan, langkah ini akan memiliki dampak yang cukup serius karena dapat berimplikasi pada eskalasi tensi yang berujung pada konflik secara meluas.

Berkaca pada strategi yang diterapkan oleh Amerika pada masa pemerintahan Obama ketika melakukan negosiasi JCPOA dengan Iran, jika memang tujuan dan prioritas utama Amerika adalah agar Iran mau melakukan negosiasi, Amerika harus mengesampingkan terlebih dahulu opsi perubahan rezim. Selama pemerintahan Amerika tetap mempertahankan sikapnya ini, harapan akan dikembalikannya isu nuklir Iran ke meja perundingan hampir tidak akan mungkin terjadi.

Dari fenomena JCPOA, Amerika Serikat dan Iran ini, peneliti juga mengambil kesimpulan bahwa perilaku Amerika di politik internasional dapat secara drastis berubah seiring dengan pergantian kepemimpinan. Prinsip realisme pada kebijakan luar negerinya pun juga. Pada era Donald Trump ini, peneliti berasumsi bahwa kebijakan Amerika di dominasi oleh landasan pemikiran realisme. Hal tersebut terbukti dengan mundur atau keluarnya Amerika Serikat dari banyak perjanjian internasional seperti Trans-Pacific Partnership dan Paris Agreement dan yang dibahas pada tulisan ini yaitu Joint Comprehensive Plan of Action.

²⁰ Wadirini. 2012. "Sanksi Ekonomi terhadap Iran dan Dampak Internasionalnya". *Info Singkat Hubungan Internasional*. Vol, IV. No

Daftar Pustaka

- Alexander L George, 1977, "Forceful Persuasion: Coercive Diplomacy as an Alternative to War", Washington D.C : United States Institute Of Peace Press, hal 5
- Arab news, 2019, "US to continue maximum pressure of sanctions on Iran, says Pompeo", diakses pada 25 Juni 2021, melalui <https://www.arabnews.com/node/1597441/middle-east>
- Arif Ramahdan, 2 Juli 2019, "Kepentingan Nasional Iran Dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) Tahun 2015-2017", 2019, FISIP Unila
- Atlantic Council, 2020, "The 'maximum pressure' campaign undermines Trump's national security strategy", diakses pada 25 Juni 2021, melalui <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/the-maximum-pressure-campaign-undermines-trumps-national-security-strategy/>
- Jack C.Plano & Roy Olton, 1990, *Kamus Hubungan Internasional*. CV.Abardin. Bandung.
- Kiki Mikail, 2018, "Perjanjian Nuklir Iran dan Kepentingan AS-Israel di Timur Tengah", *Jurnal ICMES* Vol 2, No 1
- LobeLog*, 16 November 2016, "Can the Iran Deal Survive a US Withdrawal?", melalui <https://lobelog.com/can-the-iran-deal-survive-a-us-withdrawal/> (diakses pada 9 Agustus 2020)
- Muhammad Fachri Abdillah, Skripsi : "Kebijakan Amerika Serikat Terhadap Iran Pasca Mundurnya AS dari JCPOA", (Bandung, FISIP UKI, 2015) hal 7
- Nuclear Threat Initiative*, 18 April 2014, "Iran Set to Receive Funds Under Atomic - Pact Terms", melalui <https://www.nti.org/gsn/article/iran-set-receive-funds-under-atomic-pact/> (diakses pada 5 Juli 2021 pukul 13.42)
- Nuclear Threat Initiative*, 3 Maret 2014, "Iran Reduces Key Uranium Stocks by Half: U.N. Agency", melalui <https://www.nti.org/gsn/article/iran-cuts-uranium-half-un-agency/> (diakses pada 5 Juli 2021 pukul 10.07)
- Peter V. Jakobsen, 2013 "Coercive Diplomacy", 3rd edition, Oxford : Oxford University Press, hal 241
- Reuters*. 14 Januari 2020. "Factbox: Iran's metals under new U.S. sanctions". Diakses pada 12 Maret 2021. Melalui <https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-metals-factbox-idUSKBN1ZD223>
- Reuters*. 22 Januari 2021. "Iran's oil exports rise 'significantly' despite sanctions, minister say". Diakses pada 5 Maret 2021. Melalui <https://www.reuters.com/article/iran-oil-int-idUSKBN29R0WJ>
- Reuters*. 3 Mei 2018. "Dollar dips from 2018 high; seen as temporary pause". Diakses pada 2 Maret 2021. Melalui <https://www.reuters.com/article/idUSL1N1SF1X8>
- RFE/RL, 3 November 2018,

- “Trump Highlights Renewed Iran Sanctions Ahead Of U.S. Elections”, melalui <https://www.rferl.org/a/trump-touts-renewed-iran-sanctions-as-selling-point-to-us-voters-congressional-elections-get-out-republican-vote/29580304.html> (diakses pada 10 Juni 2020)
- Singer. J.D, 2016, ”*World Politics: The Level of Analysis Problem in International Relations. Theoretical Essay*” Volume 14, No. 1, hal. 82 – 87
- The White House*, 8 Mei 2018, “Ceasing U.S. Participation in the JCPOA and Taking Additional Action to Counter Iran’s Malign Influence and Deny Iran All Paths to a Nuclear Weapon”, melalui <https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/ceasing-u-s-participation-jcpoa-taking-additional-action-counter-irans-malign-influence-deny-iran-paths-nuclear-weapon/> (diakses pada 10 Juni 2021)
- Wadirini. 2012. “Sanksi Ekonomi terhadap Iran dan Dampak Internasionalnya”. *Info Singkat Hubungan Internasional*. Vol, IV. No 04/II/P3DI/Februari/2012. ISSN: 2088-2351.
- White House, 2017, “Remarks by President Trump on Iran Strategy”, diakses pada 28 Februari 2021, melalui [www.whitehouse.gov:https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-iran-strategy/](https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-iran-strategy/)
- Wolf, R. 2017. “Donal Trump’s Status Driven Foreign Policy”. *Journal Global*